

BAB 1

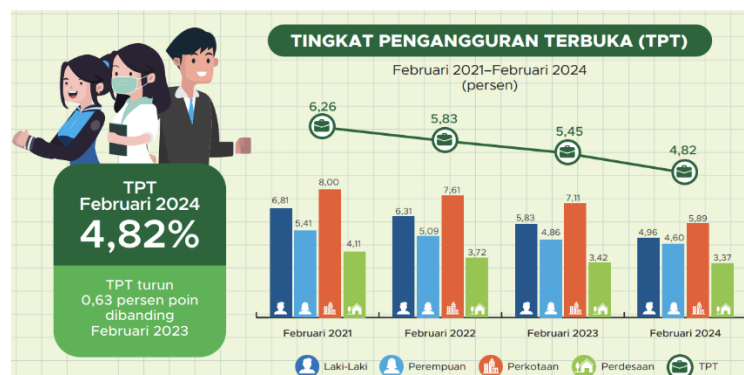
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan yang masih dihadapi Indonesia adalah berhubungan dengan strategi untuk menanggulangi kemiskinan di daerah-daerah yang paling miskin di negara ini (Bappenas, 2019). Secara lebih rinci, selaras dengan usaha dalam mengurangi jumlah penduduk miskin, harus dipastikan juga masyarakat yang telah berada di atas garis kemiskinan agar tidak terperangkap dalam lubang kemiskinan yang lebih dalam (Bappenas, 2019). Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan sebuah strategi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang sampai saat ini masih menjadi tantangan global. Tantangan global tersebut diatasi dengan memanfaatkan tujuan SDGs atau *Sustainable Development Goals* yang berisikan 17 tujuan global yang ditentukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salah satu tujuan SDGs adalah untuk pengentasan kemiskinan yang ada dengan berbagai upaya yang dilakukan (Miftahussurur, 2023).

Bappenas menjelaskan bahwa tujuan dari pelaksanaan SDGs 1 tanpa kemiskinan merupakan sebuah usaha untuk menghentikan kemiskinan dalam berbagai macam bentuk (Miftahussurur, 2023). Pada setiap negara di dunia menghadapi kendala yang berbeda tetapi pemerintahnya telah melaksanakan berbagai upaya demi memaksimalkan realisasi pengentasan kemiskinan (Miftahussurur, 2023).

Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Konsep pemberdayaan ini berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah (*powerless*). Ketidakberdayaan atau memiliki kelemahan dalam aspek: pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, *networking*, semangat, kerja keras, ketekunan, dan aspek lainnya. Kelemahan dalam berbagai aspek tadi mengakibatkan ketergantungan, ketidakberdayaan, dan kemiskinan (Anwas, 2019). Sedangkan menurut Djohani (2003) (dalam Anwas, 2019) pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga terjadi keseimbangan.



Gambar 1. 1 Tingkat Pengangguran Terbuka 2024

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2024)

Pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakatnya. Kesejahteraan masyarakat Indonesia dinilai masih belum mencapai kesetaraan apabila dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang terhitung sebesar 4,82% pada tahun 2024. Apabila dilihat dari data milik BPS Provinsi Jawa Tengah (2024), TPT di Kota Semarang mencapai 5,82% pada tahun 2024 yang berarti tingkat pengangguran di Kota Semarang lebih tinggi jika dibandingkan pada TPT Nasional. Pengangguran dalam hal ini adalah sebuah masalah pokok atau yang utama yang dirasakan oleh semua negara berkembang, pengangguran adalah suatu kondisi untuk usia kerja pada rentang 15-65 tahun yang memang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (Yoga 2021 dalam Darmawan, 2022).

Pemberdayaan masyarakat identik dengan pemanfaatan berbagai potensi yang ada di masyarakat tersebut. Salah satu aktivitas dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat adalah dengan pemanfaatan program kampung tematik. Menurut Peraturan Walikota Semarang, kampung tematik merupakan sebuah kawasan dimana masyarakat di dalamnya memanfaatkan potensi lokal yang mereka miliki atas dasar persetujuan bersama. Tujuan awal dari pelaksanaan program kampung tematik adalah pengelolaan potensi lokal secara maksimal demi pengembangan kearifan lokal dan mengatasi adanya permasalahan yang muncul seperti permasalahan lingkungan, sosial, dan ekonomi yang ada di sekitar masyarakat. Dengan mengelola potensi lokal yang

baik dan mengatasi permasalahan di sekitarnya, maka kesejahteraan masyarakat dapat tercapai seiring dengan berjalannya pemberdayaan masyarakat di dalamnya.

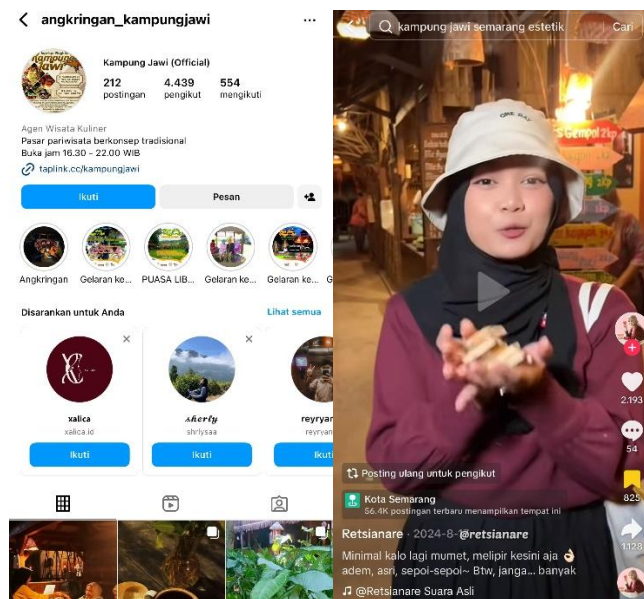


Gambar 1. 2 Total Kampung Tematik di Kota Semarang

Sumber: Pemerintah Kota Semarang, 2023

Gambar di atas merupakan data terkait perkembangan jumlah kampung tematik yang ada di Kota Semarang terhitung dari tahun 2016-2023. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa semakin kesini jumlah kampung tematik justru semakin sedikit. Pemerintah Kota Semarang menerapkan prinsip awal mula dibentuknya kampung tematik adalah dengan konsep Top Down, yang berarti peraturan dan program tersebut berasal dari pemerintah kemudian setelah adanya dana stimulan dari pemerintah, masyarakat diharapkan dapat mengembangkan daerahnya secara mandiri dengan mengelola dana yang telah diberikan. Apabila kampung tersebut akan melanjutkan programnya, maka mereka harus dapat memberdayakan dirinya sendiri yang kemudian akan menjadi perhatian pemerintah dan nantinya akan dapat pembantuan apabila memang terbukti bahwa kampung tersebut dapat berdaya sendiri.

Berdasarkan RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Semarang masih perlu dioptimalkan kembali terutama permasalahan pada aspek kesejahteraan yang meliputi pemberdayaan, yaitu terkait dengan cakupan potensi yang masih rendah. Asal mula terbentuknya Kampung Tematik Jawi salah satunya adalah berawal dari angkringan kuliner kecil yang diperuntukkan kepada masyarakat sekitar. Tempat ini disajikan secara sederhana dengan memanfaatkan bangunan bambu sebagai penyedia kuliner dan meja kursi khas yang bahan pembuatannya berasal dari kayu. Seperti halnya berdasarkan pendapat menurut (Anwas, 2019), kebutuhan dan potensi yang ada di masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam kegiatan pemberdayaan. Hal ini sejalan dengan Kampung Tematik Jawi yang memiliki berbagai potensi di dalamnya kemudian mereka diberdayakan. Menurut informasi resmi dari laman website Disbudpar (Semarang, 2024) memiliki potensi unggul berupa keunikan yang cukup berbeda dari tempat wisata lainnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya jam buka yang dimulai dari pukul 17.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB.

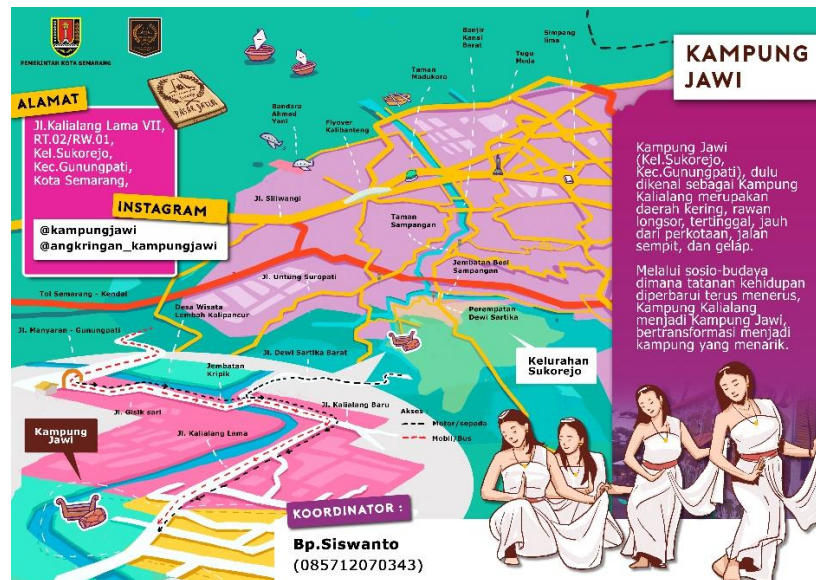


Gambar 1. 3 Keberhasilan Kampung Tematik Jawi di Media Sosial

Sumber: Admin Instagram Angkringan Kampung Tematik Jawi, 2024,
@Retsianare TikTok, 2024

Berbagai keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kampung Tematik Jawi dibuktikan dengan *booming*-nya tempat wisata ini di semua kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak remaja hingga orang dewasa. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai postingan yang tersedia di media sosial, yaitu TikTok dan Instagram. Pada laman *instagram* dapat dilihat bahwa telah banyak pengikut dari masyarakat dan unggahan yang selalu update setiap terdapat event. Sedangkan untuk laman Tiktok dapat diketahui bahwa telah banyak *reviewer* atau biasa dikenal sebagai *foodvlogger* yang mengulas bagaimana keadaan Kampung Tematik Jawi Kota Semarang yang pada saat ini sedang menjadi destinasi wisata yang banyak menarik perhatian masyarakat

walaupun apabila dihitung jarak dari pusat kota lumayan jauh, yaitu jarak tempuh Kampung Tematik Jawi dari Kota Semarang sekitar 9,9 kilometer dengan waktu tempuh kurang lebih 27 menit (KOMPAS.com, 2024).



Gambar 1. 4 Infografis Kampung Tematik Jawi di Website Kampung Tematik Semarang

Sumber: Johanes Adhi Nugroho. 2025. Gambar melalui email.

Pada infografis di atas yang disampaikan melalui website Pemerintah Kota Semarang pada laman khusus kampung tematik, disebutkan bahwa dulunya Kampung Tematik Jawi merupakan kampung yang dikenal sebagai daerah yang banyak dilanda permasalahan, seperti kampung yang rawan longsor, tertinggal dari perkotaan, dan lain-lain. Namun saat ini, kampung tersebut sudah dikelola dengan lebih baik dengan memberdayakan masyarakat di dalamnya dan memanfaatkan potensi yang ada sehingga menjadi pusat perhatian pemerintah serta diberikannya dukungan untuk menjadi destinasi

wisata yang dipromosikan melalui kanal media sosial. Dalam infografis tersebut juga ditertera layanan WhatsApp, Instagram, dan alamat dari Kampung Tematik Jawi sendiri sehingga masyarakat yang ingin berkunjung ke Kampung Tematik Jawi dapat dengan mudah menemukan alamatnya.

RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026 berisikan salah satu program yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Semarang yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan adalah program prioritas walikota yaitu pelaksanaan kampung tematik. Adanya pelaksanaan kampung tematik juga merupakan salah satu perwujudan rencana program perangkat daerah terkait pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan. Hal ini diperkuat dengan adanya regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan kampung tematik, yaitu Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2018. Setelah tersusunnya Peraturan Walikota tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang menerbitkan SK Pokdarwis untuk Kampung Tematik Jawi. Dalam regulasi tersebut, tujuan dari pelaksanaan kampung tematik salah satunya yaitu peningkatan potensi lokal yang ada di masyarakat dan lingkungan setempat. Hal ini telah terbukti dengan ketenaran yang terjadi di Kampung Tematik Jawi dengan tersebarnya berbagai berita di berbagai platform media sosial tentang wisata Kampung Tematik Jawi tersebut. Masyarakat yang awalnya enggan untuk ikut berkontribusi dalam program ini akhirnya bersedia untuk ikut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui program Kampung Tematik Jawi yang memanfaatkan potensi di wilayah tersebut berupa potensi kuliner.

Sebuah kebijakan atau program pada hakikatnya adalah sebuah instrumen yang digunakan pemerintah untuk melakukan perubahan ekonomi, sosial, maupun budaya pada masyarakat. Demikian pula halnya dengan program-program pemberdayaan masyarakat yang dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan ataupun dampak yang diinginkan (Wrihatnolo, 2009). Pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Tematik Jawi telah mampu membuktikan bahwa kampung tersebut bukan termasuk dalam wilayah yang memiliki stigma buruk yaitu banyaknya longsor, kekeringan, hingga tindakan kriminal. Dengan dibentuknya Kampung Tematik Jawi maka masyarakat di sekitar situ memanfaatkan potensinya mereka dengan menonjolkan pusat kuliner yang mereka miliki.

Pokok-pokok pemberdayaan yang telah ditawarkan oleh Sumadyo (2001) (dalam Mardikanto, 2020) yang di dalamnya terdiri dari bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kampung Tematik Jawi untuk saat ini telah mencakup keempat dimensi pokok-pokok pemberdayaan. Hal ini dibuktikan dengan masyarakat yang telah berdaya mandiri dengan memanfaatkan potensi yang mereka miliki, masyarakat dapat membangun sebuah destinasi wisata yang berfokus pada bidang kuliner, masyarakat telah bangkit dari stigma buruk tentang kampung mereka, dan masyarakat terikat oleh sebuah organisasi, yaitu Kampung Tematik Jawi.

Diharapkan dengan adanya pemberdayaan masyarakat dalam kampung tematik, masyarakat tidak hanya akan menjadi sasaran atau objek dari program penanggulangan kemiskinan, tetapi juga akan menjadi pelaku aktif terutama di Kota Semarang. Dengan memberdayakan warga setempat, Kampung Tematik Jawi memungkinkan masyarakat untuk mengoptimalkan semua potensi lingkungan setempat. Masyarakat dapat mengidentifikasi potensi dan masalah yang ada pada lingkungan yang memiliki potensi serta merumuskan solusi dengan memanfaatkan potensi lingkungan yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan kampung tematik lainnya di Kota Semarang. Berdasarkan laman berita (Agus, 2022), terdapat beberapa kampung tematik yang sudah vakum dengan berbagai alasan masing-masing, seperti halnya yang terjadi di Kampung Tematik Olahan Mangga yang beralamat di Kelurahan Banjardowo, Genuk yang kini telah vakum dikarenakan produksi olahan mangga yang tidak menentu karena termasuk buah musiman. Selain karena waktu panen yang tidak menentu, terdapat beberapa warga yang sengaja menjual buah secara langsung yang artinya tidak melalui proses pengolahan lebih lanjut, hal ini tentunya kurang dapat memaksimalkan potensi yang mereka miliki dan akhirnya masyarakatnya dinilai kurang diberdayakan.

Peneliti merasa tertarik dengan penelitian di Kampung Tematik Jawi karena tempat tersebut pernah meraih penghargaan tingkat nasional di saat

kondisi kampung tematik lain mulai mengalami kemerosotan sehingga peneliti merasa penelitian ini harus dilakukan untuk melihat bagaimana pemberdayaan masyarakat berlangsung di kampung tematik tersebut, apakah potensi yang mereka punya benar-benar dimanfaatkan dengan optimal sehingga dapat memperoleh penghargaan pada tingkat nasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Dinda Ari (2023) dengan judul "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kampung Tematik Jawi Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang" memiliki perbedaan penelitian yang terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian terdahulu berfokus pada tahapan partisipasi masyarakat dengan menggunakan teori Cohen and Uphoff dalam menganalisis partisipasi masyarakat, sedangkan penelitian ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini juga dapat membuktikan permasalahan yang diangkat dari penelitian terdahulu, yaitu terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kampung Tematik Jawi belum optimal. Keberhasilan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Tematik Jawi nantinya dapat dianalisis apakah terdapat faktor pendukung berupa meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat atau tidak.

Ilmu administrasi publik mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Di Kampung Tematik Jawi sudah terdapat kolaborasi dengan ketiga *stakeholders* tersebut dalam penyediaan sumber daya, pelatihan, dan akses pasar bagi produk lokal. Selain ilmu

kolaborasi, adanya inovasi dalam pelayanan publik juga termasuk dalam ilmu administrasi publik. Inovasi tersebut dapat berupa pemanfaatan teknologi seperti promosi produk atau kegiatan melalui platform media sosial, yaitu Instagram.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menjadi tertarik untuk meningkatkan pemahaman terkait permasalahan tersebut dalam ranah administrasi publik dengan pendekatan dan teori yang sesuai dengan fokus permasalahan melalui rumusan masalah bagaimana penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki dan apa saja yang menjadi faktor keberhasilan dalam penyelenggaraan pemberdayaan di Kampung Tematik Jawi, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Program Kampung Tematik Jawi ini termasuk dalam *"best practice"* yang nantinya dalam pelaksanaan dapat dicontoh atau dijadikan *"role model"* kampung tematik lainnya di Kota Semarang, terutama yang masih belum optimal dalam memanfaatkan potensi yang mereka miliki untuk mengembangkan kampung tematiknya sekaligus bisa menjadi destinasi wisata di Kota Semarang. Analisis yang akan dilakukan oleh peneliti akan dikemas dengan judul "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Tematik Jawi Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang".

1.2 Identifikasi Masalah

- a. Tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Semarang masih rendah
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang masih tinggi apabila dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia
- c. Beberapa kampung tematik di Kota Semarang sudah tidak beroperasi lagi
- d. Beberapa kampung tematik di Kota Semarang belum mampu menghadirkan inovasi di dalamnya sehingga kalah saing dengan destinasi wisata lainnya

1.3 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat di Kampung Tematik Jawi Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang?
- 2) Apa saja faktor keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat pada program Kampung Tematik Jawi Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1) Menganalisis pemberdayaan masyarakat di Kampung Tematik Jawi Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang.
- 2) Menganalisis faktor keberhasilan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada program Kampung Tematik Jawi Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang dalam mencapai tujuan.

1.5 Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memiliki potensi sebagai sumber referensi yang mendukung peningkatan pengetahuan dan pertukaran gagasan, yang secara efektif mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki kualitas lingkungan permukiman di Kota Semarang melalui program kampung tematik dengan tujuan mengurangi tingkat kemiskinan.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti berambisi untuk memberikan kontribusi baru dengan menyajikan informasi terkini mengenai pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat lewat kampung tematik. Hal ini diharapkan mampu memotivasi peneliti untuk terus mengembangkan pengetahuan mereka dengan mencari data terkini dari berbagai sumber dan meningkatkan keterampilan dalam menjalankan riset.

b. Bagi Perguruan Tinggi Negeri

Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini akan menjadi sumber referensi yang berharga dan menambah wawasan mengenai pelaksanaan langkah-langkah dalam program pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik dengan tujuan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat serta memperbaiki kualitas lingkungan permukiman.

c. Bagi Pemerintah

Peneliti berharap pemerintah daerah akan melanjutkan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan program kampung tematik di Kota Semarang dengan tujuan mencapai hasil sesuai harapan yang tercantum dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Panduan Pelaksanaan Kampung Tematik. Harapannya, evaluasi ini dapat mencegah terjadinya disfungsi oleh birokrasi sehingga program dapat berjalan efektif sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

d. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap agar masyarakat dapat mengomunikasikan pengetahuan tentang inovasi program pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik dengan tujuan untuk aktif berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas hidup, mengatasi kemiskinan, dan memperbaiki kualitas lingkungan permukiman.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI/TAHUN	JUDUL	TUJUAN PENELITIAN	METODE & LANDASAN TEORI	HASIL PENELITIAN
1	Nisa Hafizhotus Syarifa dan Atika Wijaya dalam <i>Solidarity: Journal of Education, Society and Culture</i> Vol. 8 No. 1 Tahun 2019 (Syarifa & Wijaya, 2019)	Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan melalui Program Kampung Tematik (Studi Kasus di Kampung Batik Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang)	Penelitian ini bertujuan untuk menelaah partisipasi masyarakat di Kampung Batik pada kegiatan pemberdayaan di dalamnya	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan Longwe (Sara Hlupekile Longwe, 1991) untuk menganalisis partisipasi masyarakat pada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di dalamnya terdiri dari lima dimensi.	Hasil penelitian memberitahukan bahwa 1. Keberhasilan program pemberdayaan dapat ditinjau dari partisipasi masyarakatnya dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta evaluasi 2. Tingkat kesejahteraan meningkat dan masyarakat menjadi lebih mandiri setelah

					adanya program kampung tematik 3. Minimnya peran dari aktor penggerak dan rendahnya motivasi masyarakat untuk meningkatkan wilayahnya dengan cara swadaya berdampak pada pelaksanaan kampung tematik yang belum optimal.
2	Ravik Karsidi, Drajat Tri Kartono, dan Dina Herdaningrum dalam PROSIDING SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 Tahun 2021 (Karsidi et al., 2021)	Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Kampung Tematik Bandarharjo Semarang Utara	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pemberdayaan masyarakat di Kampung Mangoet Desa Bandarharjo	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dianalisis menggunakan pokok-pokok pemberdayaan menurut Mardikanto (2020) dengan empat dimensi di dalamnya.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya temuan evaluatif terhadap proses dan hasil. Temuan evaluatif terhadap proses pemberdayaan masyarakat di Desa Bandarharjo dinilai telah sesuai dengan tahapan pemberdayaan menurut berbagai literatur tentang pemberdayaan

					masyarakat. Sedangkan untuk temuan evaluatif terhadap hasil Desa Bandarharjo berhasil meningkatkan tingkat kesadaran masyarakatnya dalam partisipasi di komunitasnya, namun masih dibutuhkan pelatihan tentang kemandirian dan berdaya secara swadaya.
3	Inayatul Ilahiyah Asshodiqoh dan Ilyas dalam Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 2 Tahun 2023 (Inayatul Ilahiyah Asshodiqoh, 2023)	Pemberdayaan Masyarakat Kampung Tematik Jamrut melalui Budidaya Perkebunan di Kelurahan Ngijo Kecamatan Gunungpati	Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan budidaya perkebunan di Kampung Tematik Jamrut dalam proses pemberdayaan masyarakat	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Tahapan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat menurut Lippit (1961).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa tahapan pemberdayaan yang dialami oleh masyarakat Kampung Jamrut, di mana awal proses pemberdayaan dimulai oleh Dinas Pertanian, berbagai permasalahan diselesaikan oleh Dinas Pertanian, kemudian masyarakat diberikan materi dan praktek yang

					sesuai dengan potensi mereka.
4	Ida Nur Faizah, Nina Widowati, dan Amni Zarkasyi dalam <i>Journal of Public Policy And Management Review</i> Vol. 11 No. 3 Tahun 2022 (Faizah, I. N., Widowati, N., & Zarkasyi, 2022)	Efektivitas Program Kampung Tematik di Kampung Alam Malon Kelurahan Gunungpati Kecamatan Gunungpati Kota Semarang	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program kampung tematik di Kampung Alam Malon Kelurahan Gunungpati Kota Semarang	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Efektivitas Program menurut Edy Sutrisno (2001) yang terdiri dari empat indikator.	Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa masih terdapat beberapa masyarakat yang belum memahami maksud program, belum optimalnya kualitas lingkungan dan partisipasi masyarakat, pendapatan kelompok masyarakat yang belum mengalami perubahan ekonomi secara signifikan sehingga program kampung tematik di Kampung Alam Malon masih belum efektif pelaksanaannya.
5	Dinda Ari Putri Pamungkas (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro) (Pamungkas, 2023)	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kampung Tematik Jawi Kelurahan Sukorejo Kecamatan	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kampung Tematik	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Tahap Partisipasi menurut Cohen &	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kampung Tematik Jawi mengalami berbagai dampak positif tetapi juga berhadapan dengan beberapa kendala di dalamnya. Dampak

		Gunungpati Kota Semarang	Jawi Kota Semarang	Uphoff (1997) yang terdiri dari empat tahap.	positifnya berupa peningkatan ekonomi, perbaikan citra wilayah, dan peningkatan keterampilan masyarakatnya, sedangkan untuk kendala di dalamnya adalah tingkat partisipasi masyarakat yang dinilai masih terbatas.
6	Ari Dwi Setyowati, Amin Yusuf, Abdul Malik, dan Jingduo Wang dalam Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 10 No. 1 Tahun 2023 (Setyowati et al., 2023)	<i>Community Empowerment Through Making Iboni Craft to Improve Community Welfare and The Economic Impact</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dengan kerajinan eceng gondok Iboni	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Tahapan Pemberdayaan menurut Sulistyani (2004)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Rowoboni berhasil ditingkatkan melalui program pemberdayaan dengan pelaksanaan kerajinan eceng gondok di Iboni Craft. Peningkatan kesejahteraan masyarakat ditandai dengan adanya kemandirian ekonomi sehingga dapat mengurangi angka

					pengangguran di Desa Rowoboni.
7	Nani Nurkomala, Diswandi Diswandi, dan Luluk Fadliyanti dalam <i>European Journal of Development Studies</i> Vol. 3 Tahun 2023 (Nurkomala et al., 2023)	<i>The Role of Community Empowerment Institutions for Village Development</i>	Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran lembaga masyarakat dalam pemberdayaan di Desa Tanjung Karang Permai Nusa Tenggara Barat	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat menurut Arbain (2014)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran lembaga pemberdayaan masyarakat telah melakukan monitoring dengan baik tetapi terkendala tentang partisipasi masyarakat yang masih kurang dan kerjasama antara masyarakat dengan fasilitator desa yang belum maksimal dilakukan.
8	Yudan Hermawan, Sujarwo, dan Yoyon Suryono dalam <i>The Qualitative Report</i> Vol. 28 No. 5 Tahun 2023 (Hermawan et al., 2023)	<i>Learning From Goa Pindul: Community Empowerment Through Sustainable Tourism Villages in Indonesia</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan keberhasilan pemberdayaan masyarakat berbasis pada pariwisata berkelanjutan di Goa Pindul, Indonesia	Penelitian ini menggunakan pendekatan Interpretative Phenomenological Analysis; IPA). Penelitian ini menggunakan teori Partisipatif menurut Chevalier & Buckles (2019)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dimulai dengan tahap penyadaran melalui sosialisasi dan pengabdian masyarakat, kemudian adanya peningkatan kapasitas dengan pelatihan manajemen pariwisata

					berbasis kebutuhan dan pembentukan POKDARWIS dengan tujuan untuk pengelolaan potensi yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat yang berbasis pariwisata tetap harus dilakukan dengan pertimbangan keberlanjutan lingkungan dan budaya masyarakat sekitarnya.
9	Kelen, C. V dkk dalam <i>PLOS Global Public Health</i> Vol. 3 Tahun 2023 (Kelen et al., 2023)	<i>Community Empowerment Through Participation In A Tsetse Control Project In The Democratic Republic of Congo</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menilai proses partisipasi masyarakat sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi pemberdayaan masyarakat	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Evaluasi Pemberdayaan menurut Draper (2010)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat menjadi sumber pemberdayaan di dalamnya, seperti halnya masyarakat yang terlibat di dalamnya memiliki rasa kepemilikan sehingga dapat meningkatkan motivasi mereka dalam kesejahteraan masyarakat. Hasil evaluasi pemberdayaan

					masyarakat menunjukkan adanya partisipasi masyarakat yang meningkat dari waktu ke waktu.
10	Rachmawati, Eva dalam IOP Conference Series: Earth and Environmental Science Vol. 528 Tahun 2020 (Rachmawati, 2020)	<i>Tourism and Community Empowerment at Gunung Leuser National Park, Indonesia</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengamati pariwisata dalam pemberdayaan masyarakat	Penelitian ini menggunakan metode campuran, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Efektivitas Pariwisata Melalui Pemberdayaan Masyarakat menurut Scheyven (1999).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pariwisata menggunakan pendekatan <i>bottom-up</i> tidak bisa dijadikan jaminan dalam pemberdayaan masyarakat. Temuan lain menunjukkan bahwa adanya dampak baik pada sektor pariwisata dengan memanfaatkan pemberdayaan masyarakat di daerah pinggir.

Sumber: Analisis Peneliti

Analisis terhadap penelitian terdahulu seperti pada tabel 1.1 di atas tentunya dapat menghasilkan persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang saat ini sedang dilakukan oleh peneliti Nadhira Amalia Putri (2025) dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat melalui Kampung Tematik Jawi Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang” sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nisa, H. S. dan Wijaya, A. (2019) dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan melalui Program Kampung Tematik (Studi Kasus di Kampung Batik Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang)” memiliki persamaan fokus Pemberdayaan dengan penelitian ini. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokus penelitian yang digunakan. Penelitian terdahulu terletak di Kampung Batik Kelurahan, Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur, sedangkan penelitian ini terletak di Kampung Tematik Jawi, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Karsidi, R., Kartono, D. T., dan Herdaningrum, D. (2020) dengan judul ”Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Kampung Tematik Bandarharjo Semarang Utara” memiliki persamaan fokus penelitian Pemberdayaan Masyarakat yang terletak di Kampung Tematik. Selain itu penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian ini tentang teori yang digunakan untuk menganalisis pokok-pokok pemberdayaan, yaitu teori yang disampaikan oleh Mardikanto (2020) yang terdiri dari Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada lokus penelitian. Lokus penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu terletak di Kampung Tematik Bandarharjo Semarang Utara, sedangkan penelitian ini terletak di Kampung Tematik Jawi, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Asshodiqoh, I. I., dan Ilyas (2023) dengan judul "Pemberdayaan Masyarakat Kampung Tematik Jamrut melalui Budidaya Perkebunan di Kelurahan Ngijo Kecamatan Gunungpati" memiliki persamaan fokus Pemberdayaan Masyarakat dengan penelitian ini. Perbedaan penelitian terletak pada analisis fenomena, penelitian terdahulu menganalisis pada tahapan pemberdayaan masyarakat yang ada di dalamnya, sedangkan penelitian ini menganalisis pada pokok-pokok pemberdayaan masyarakat.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Faizah, I. N., Widowati, N., dan Zarkasyi A. (2022) dengan judul "Efektivitas Program Kampung Tematik di Kampung Alam Malon Kelurahan Gunungpati Kecamatan Gunungpati Kota Semarang" memiliki persamaan menganalisis Kampung Tematik dengan penelitian ini. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitian pada penelitian terdahulu yaitu terkait efektivitas program yang terdiri dari empat indikator, yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata, sedangkan fokus penelitian ini terkait pokok-pokok pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas, D. A. P. (2023) dengan judul "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kampung Tematik Jawi Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang" memiliki persamaan analisis Kampung Tematik dengan penelitian ini. Persamaan lainnya terletak pada lokus penelitian, yaitu terletak di Kampung Tematik Jawi, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian beserta teori yang digunakan oleh masing-masing peneliti. Fokus penelitian pada penelitian terdahulu adalah terkait partisipasi masyarakat di Kampung Tematik Jawi dengan teori yang digunakan yaitu Tahapan

Partisipasi menurut Cohen & Uphoff (1997), sedangkan fokus penelitian pada penelitian ini adalah terkait pokok-pokok pemberdayaan di Kampung Tematik Jawi dengan teori yang digunakan yaitu Pokok-Pokok Pemberdayaan menurut Mardikanto (2020).

6. Penelitian yang dilakukan oleh Setyowati, A. D., Yusuf, A., Malik, A., dan Wang, J. (2023) dengan judul "*Community Empowerment Through Making Iboni Craft to Improve Community Welfare and The Economic Impact*" memiliki persamaan fokus Pemberdayaan dengan penelitian ini. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fenomena penelitian. Pada penelitian terdahulu, analisis fenomena penelitiannya adalah tahapan pemberdayaan masyarakat, sedangkan analisis fenomena penelitian pada penelitian ini adalah pokok-pokok pemberdayaan masyarakat.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Nurkomala, N., Diswandi, D., dan Fadliyanti, L. (2023) dengan judul "*The Role of Community Institutions for Village Development*" memiliki persamaan penelitian fokus Pemberdayaan Masyarakat dengan penelitian ini. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada analisis fenomena penelitian. Analisis fenomena penelitian pada penelitian terdahulu adalah tentang peran lembaga pemberdayaan masyarakat, sedangkan analisis fenomena dari penelitian ini adalah tentang pokok-pokok pemberdayaan masyarakat.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Hermawan, Y., Sujarwo, dan Suryono, Y. (2023) dengan judul "*Learning From Goa Pindul: Community Empowerment Through Sustainable Tourism Villages in Indonesia*" memiliki persamaan fokus Pemberdayaan Masyarakat dengan penelitian ini. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada analisis fenomena penelitiannya. Analisis fenomena penelitian yang dilakukan pada penelitian terdahulu adalah tentang partisipasi di Desa

Wisata Berkelanjutan, sedangkan untuk penelitian ini analisis fenomena penelitiannya tentang pokok-pokok pemberdayaan di Kampung Tematik.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Kelen et al. (2023) dengan judul *"Community Empowerment Through Participation in a Tsetse Control Project in the Democratic Republic of Congo"* memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu tentang fokus penelitian. Kedua penelitian ini memiliki fokus penelitian yaitu tentang Pemberdayaan Masyarakat. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan untuk menganalisis fenomena penelitian, teori yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu teori tentang Evaluasi Pemberdayaan menurut Draper (2010) dengan lima dimensi di dalamnya, yaitu kepemimpinan dan kepemilikan, perencanaan dan organisasi, kesediaan, otonomi, serta keterlibatan masyarakat, sedangkan teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Pokok-Pokok Pemberdayaan menurut Mardikanto (2020) yang terdiri dari empat dimensi, yaitu bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan.
10. Penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati, Eva (2023) dengan judul *"Tourism and Community Empowerment at Gunung Leuser National Park, Indonesia"* memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu pada fokus penelitian. Fokus penelitian dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah Pemberdayaan Masyarakat. Perbedaan penelitian terdahulu menganalisis efektivitas pariwisata pada pemberdayaan masyarakat, sedangkan untuk penelitian ini menganalisis tentang bagaimana pelaksanaan kampung tematik melalui pemberdayaan masyarakat.

Pada penelitian saya kali ini akan memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Dinda Ari Putri Pamungkas (2023). Selain lokus penelitiannya yang memiliki persamaan, di dalam penelitian terdahulu terdapat faktor keberhasilan yang di dalamnya terdiri dari beberapa

faktor pendorong munculnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kampung Tematik Jawi. Penelitian saya kali ini juga mengukur keberhasilan dengan beberapa dimensi di dalamnya, salah satu dimensi yang memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu adalah dimensi partisipasi yang mendorong keberhasilan pemberdayaan masyarakat di Kampung Tematik Jawi. Novelty dalam penelitian ini terletak pada pendekatan pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya berfokus pada pengembangan kapasitas warga lokal saja seperti yang umumnya menjadi fokus penelitian sebelumnya. Penelitian ini nantinya akan mendalami bagaimana pemberdayaan masyarakat dapat diinstruksikan ke bidang komersial sehingga dapat melibatkan berbagai aktor eksternal. Pelibatan berbagai aktor eksternal tentunya berdampak pada peran yang tidak hanya sebatas warga lokal saja tetapi dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar yang dapat berdampak pada terciptanya sinergi yang jangkauannya lebih luas agar dapat menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat Kampung Tematik Jawi secara berkelanjutan.

1.6.2 Administrasi Publik

1.6.2.1 Pengertian Administrasi Publik

Beberapa pakar memberikan pemahaman mengenai administrasi publik (Keban, 2019) di antaranya yaitu:

- a. Menurut Dimock, Dimock, & Fox (dalam Keban, 2019) administrasi publik merupakan pelayanan kebutuhan masyarakat sebagai konsumen dengan cara memproduksi barang dan jasa. Pengertian tersebut meninjau administrasi publik berada pada kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan pelayanan dan barang publik.
- b. Menurut Barton & Chappel (dalam Keban, 2019) administrasi publik merupakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Hal tersebut menitikberatkan pada pelayanan kepada publik yang melibatkan beberapa personil di dalamnya.
- c. Menurut Nicholas Henry (dalam Keban, 2019) administrasi publik merupakan sebuah pemahaman yang meliputi pemerintah dengan hubungannya yang berkaitan dengan masyarakat sebagai pihak yang diperintah dan di dalamnya terdapat kombinasi antara teori dan prakteknya serta mendorong agar kebijakan publik yang ada di dalamnya dapat lebih responsif terhadap kebutuhan yang ada di masyarakat.

Dari beberapa definisi administrasi publik di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi publik merupakan sekumpulan orang yang menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemerintahan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Menurut Henry (2007) (dalam Ikeanyibe et al., 2017) menjelaskan pergeseran paradigma administrasi publik menjadi enam tahapan, yaitu sebagai berikut:

- a. *The Politics Administration Dichotomy*, yaitu sebuah strategi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dengan menggunakan pemikiran tentang pemisahan politik dan administrasi yang terdapat pada fungsi pemerintahan. Basheka (2012) (dalam Ikeanyibe et al., 2017) menyampaikan bahwa Woodrow Wilson memutuskan beberapa persyaratan administrasi publik yang efektif, yaitu (1) Pemisahan administrasi dan politik; (2) Analisis komparatif antara organisasi politik dan swasta; (3) Peningkatan efisiensi bisnis, seperti praktik dan sikap terhadap operasi sehari-hari; dan (4) Peningkatan efektivitas tentang pelayanan publik dengan cara manajemen dan pelatihan untuk pegawai negeri sipil, serta mendorong adanya penilaian yang berdasarkan kepada prestasi (Basheka, 2012).
- b. *The Principles of Administration*, dilanjutkan dengan adanya paradigma prinsip-prinsip administrasi yang diyakini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi keberlangsungan pemerintahan. Tanpa

memperhatikan sektor, lingkungan, misi, fungsi, dan kerangka kelembagaan, prinsip-prinsip dalam paradigma ini dapat berlaku di seluruh lingkungan administrasi. Gulick dan Urwick (1937) (dalam Ikeanyibe et al., 2017) mengidentifikasi tujuh prinsip administrasi, yaitu *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, and Budgeting*.

- c. *Public Administration as Political Science*, menganggap bahwa administrasi publik bukan bidang yang terpisah dengan ilmu politik sehingga tidak dapat dipisahkan karena kedua bidang tersebut saling berkaitan khususnya dalam praktik pemerintahan. Oleh karena itu, muncul paradigma baru yang beranggapan bahwa administrasi publik sebagai ilmu politik dimana lokusnya adalah birokrasi pemerintahan. Pada masa itu ilmu politik dianggap sebagai ilmu yang dominan dalam dunia administrasi publik sehingga administrasi publik sendiri mengalami krisis identitas (dalam Keban, 2019).
- d. *Public Administration as Management*, paradigma ini menunjukkan beberapa intelektual memantapkan pandangan manajemen ke dalam dunia administrasi publik. Kedua ilmu pada paradigma ketiga dan keempat bersaing untuk memperoleh jiwa administrasi publik di dalamnya. Pada paradigma ini, semua fokus tidak hanya dapat diterapkan dalam dunia bisnis saja, tetapi juga dalam dunia administrasi publik (dalam Keban, 2019).

- e. *Public Administration as Public Administration* merupakan tahap “*New Public Management*” (NPM) yang berfokuskan pada birokrasi hierarkis dialihkan ke pasar dan organisasi sektor swasta. Paradigma ini bersumber dari peleburan antara teori ekonomi dan teknik manajemen sektor swasta. Pada dasarnya, administrasi publik konvensional memandang bahwa pemerintah merupakan satu-satunya aktor yang bersifat otonom melalui struktur birokrasi, tetapi pada paradigma ini NPM adalah pergeseran untuk menggunakan sektor swasta (dalam Ikeanyibe et al., 2017).
- f. *Governance*, paradigma ini menjelaskan bahwa dalam rangka menciptakan kesejahteraan warga negaranya, para pemimpin politik melaksanakan kekuasaan atau wewenangnya dengan melewati beberapa proses kompleks yang di dalamnya terdapat berbagai sektor masyarakat yang ikut memegang kekuasaan dan memberlakukan serta mengumumkan kebijakan publik yang secara langsung dapat berdampak pada interaksi antara manusia dengan kelembagaan, pembangunan ekonomi dan sosial (Tamayao 2014, dalam Ikeanyibe et al., 2017).

Pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Tematik Jawi tergolong dalam paradigma *governance* karena di dalamnya terdapat kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dalam rangka mengelola

urusan sosial, politik, dan ekonomi khususnya perihal pemberdayaan. Masyarakat di sini tentunya menjadi sasaran sehingga harus berperan secara aktif dalam program-program yang berlangsung di lingkungan mereka. Pemerintah di sini memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan, pembangunan infrastruktur, dan sosialisasi program, sedangkan sektor swasta berperan dalam membantu pemasaran produk serta pengembangan inovasi di dalamnya.

1.6.3 Manajemen Publik

Manajemen publik merupakan suatu kajian interdisiplin yang mencakup berbagai aspek organisasi secara umum dan menggabungkan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling* dengan *sumber daya manusia*, *keuangan*, *phisik*, *informasi*, dan *politik* (Overman dalam Keban, 2019). Menurut pandangan (Ott, Hyde, dan Shafritz dalam Keban, 2019) manajemen publik adalah tahapan mendorong pergerakan sumber daya manusia dan non-manusia sesuai instruksi dari suatu kebijakan publik.

1.6.4 Pemberdayaan Masyarakat

1.6.4.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Mardikanto (2020) menyatakan bahwa pemberdayaan itu sebagai peningkatan skala/*grade* utilitas dari suatu obyek yang diberdayakan

melalui suatu proses yang sudah terencana. Kelompok masyarakat yang dinilai lemah dan tak berdaya nantinya akan mengikuti berbagai kegiatan yang bertujuan untuk pengoptimalan keberdayaan. Pemerintah memang memiliki tanggungjawab dalam hal pemberian *power* kepada masyarakat yang miskin atau kurang mampu atau *powerless*, namun dukungan untuk masyarakat yang kurang berdaya juga harus didukung oleh berbagai pihak, khususnya dukungan yang berasal dari masyarakat itu sendiri yaitu caranya dengan ikut berkontribusi pada setiap kegiatan/program pemberdayaan (Hamid, 2018).

Pemberdayaan masyarakat merupakan dukungan kepada masyarakat agar sanggup dalam meningkatkan kesejahteraannya secara swadaya terutama mereka yang tergolong sebagai miskin potensi, kaum perempuan dan kelompok yang kurang diperhatikan keberadaannya (Mardikanto, 2020a). Sedangkan menurut Gunawan (2009) (dalam Hamid, 2018) pemberdayaan masyarakat dideskripsikan sebagai sebuah aktivitas sosial di mana suatu komunitas berkolaborasi untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan bersama, guna mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang tersedia.

Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha persiapan untuk masyarakat dalam upaya penguatan kelembagaan agar mereka mampu mencapai peningkatan, swasembada, dan kesejahteraan dalam lingkungan

yang menjunjung tinggi keadilan sosial secara berkelanjutan (Afriansyah, 2023). Sedangkan menurut Ife, Jim (2016) (dalam Afriansyah, 2023) pemberdayaan masyarakat merupakan suatu rangkaian untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan masyarakat dan berkontribusi untuk memengaruhi kehidupan kelompoknya dengan cara pemberian sumber daya, peluang, pengetahuan, dan keahlian.

Merujuk dari beberapa konsep pemberdayaan masyarakat di atas, maka maksud dari pemberdayaan mencakup beberapa upaya perbaikan menurut (Mardikanto, 2020a) sebagai berikut:

1. Perbaikan pendidikan (*better education*) dalam hal ini pemberdayaan harus disusun sebagai bentuk pendidikan yang lebih baik sehingga dapat menciptakan semangat belajar sepanjang masa;
2. Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*) dalam hal ini dengan adanya semangat belajar sepanjang masa, harapannya aksesibilitasnya juga dapat diperbaiki terutama tentang pusat inovasi, pemberi dana/investor, distributor, dan badan pemasaran;
3. Perbaikan tindakan (*better action*) dengan modal peningkatan pendidikan dan aksesibilitas, harapannya juga akan tercipta berbagai tindakan yang semakin berkualitas;

4. Perbaikan kelembagaan (*better institution*) dengan modal peningkatan program dan tindakan yang dilaksanakan, harapannya juga dapat meningkatkan kelembagaan, khususnya perihal pengembangan jaringan kolaborasi dengan berbagai pihak;
5. Perbaikan usaha (*better business*) diharapkan dapat meningkatkan bisnis yang dilakukan dengan modal peningkatan pendidikan, aksesibilitas, tindakan, dan kelembagaan;
6. Perbaikan pendapatan (*better income*) dengan modal peningkatan bisnis, harapannya juga dapat meningkatkan pendapatan yang diterimanya;
7. Perbaikan lingkungan (*better environment*) dengan modal peningkatan pendapatan, harapannya juga dapat memperbaiki lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial;
8. Perbaikan kehidupan (*better living*) dengan modal peningkatan pendapatan dan keadaan lingkungan, harapannya juga dapat meningkatkan kehidupan sehari-hari setiap masyarakat;
9. Perbaikan masyarakat (*better community*) dengan modal peningkatan kehidupan masyarakat, harapannya juga akan tercipta kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan beberapa perbaikan yang telah dipaparkan di atas, maka diperlukan adanya pemberdayaan masyarakat yang memiliki maksud untuk mentransformasikan kesadaran rakyat dan mendekatkan masyarakat dengan akses untuk perbaikan kehidupannya. Sehubungan dengan hal ini, pemberdayaan selalu mengacu pada usaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik dari segi fisik, mental, ekonomi, maupun aspek sosial dan budaya (Mardikanto, 2020a).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai sebuah usaha dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang masih mengalami kemunduran dalam hidupnya sehingga belum mencapai kesejahteraan. Dalam pemberdayaan masyarakat terdapat pemanfaatan potensi lokal oleh masyarakat setempat dengan program yang disusun oleh masyarakat itu sendiri tentunya dengan pertimbangan terkait dampak lingkungan. Selain itu terdapat juga keterlibatan peran dari berbagai pihak seperti sektor swasta, lembaga penelitian, perguruan tinggi, LSM, dan pemerintah dengan melaksanakan upaya yang berkelanjutan.

1.6.4.2 Pokok Pemberdayaan Masyarakat

Sumadyo (2001) (dalam Mardikanto, 2020) mengemukakan bahwa terdapat tiga upaya pokok dalam pemberdayaan masyarakat yang disebut sebagai Tri Bina, yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan. Dalam rumusan ini, Mardikanto (2003) menambahkan pentingnya Bina

Kelembagaan karena ketiga bina yang dikemukakan oleh Sumadyo hanya akan terwujud apabila didukung oleh efektivitas beragam kelembagaan yang diperlukan (Mardikanto, 2020a), berikut ini adalah penjelasan lebih dalam terkait keempat pokok pemberdayaan tersebut:

- (1) Bina Manusia, merupakan upaya yang utama dan pertama sehingga harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut tentunya berlandaskan dengan pemahaman bahwa tujuan pembangunan adalah untuk peningkatan mutu hidup atau kesejahteraan manusia.
- (2) Bina Usaha, merupakan upaya penting dalam setiap pemberdayaan karena bina manusia yang tidak berdampak atau bermanfaat bagi pembenahan kesejahteraan tidak akan diminati. Namun sebaliknya, hanya Bina Manusia yang mampu berdampak atau bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan yang akan diminati atau memperoleh dukungan dengan bentuk partisipasi masyarakat.
- (3) Bina Lingkungan, merupakan upaya dalam memerhati lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik di sini yang menyangkut pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, sedangkan lingkungan sosial berupa upaya perbaikan kesejahteraan sosial masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan

(areal kerja), maupun yang terkena dampak dari kegiatan pemberdayaan.

(4) Bina Kelembagaan, merupakan sebuah perangkat umum yang ditaati oleh anggota suatu komunitas (Hayami dan Kikuchi, 1981 dalam Mardikanto, 2020). Pada prinsipnya, sebuah relasi-sosial dapat disebut sebagai sebuah kelembagaan apabila mengandung empat komponen, yaitu:

- a. Komponen person, di mana individu yang terlibat dalam suatu lembaga dapat dikenali dengan jelas;
- b. Komponen kepentingan, di mana individu tersebut pasti terikat oleh satu kepentingan atau tujuan sehingga mereka harus saling berinteraksi;
- c. Komponen aturan, di mana setiap lembaga mengembangkan serangkaian kesepakatan yang dipegang bersama;
- d. Komponen struktur, di mana setiap individu memiliki posisi dan peran yang harus dilaksanakan secara tepat sehingga mereka tidak dapat mengubah posisinya sesuai keinginan sendiri.

1.6.4.3 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat beberapa tahapan pemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan dalam mengkaji efektivitas pemberdayaan yang sedang berlangsung di masyarakat. Tahapan yang dilakukan tentunya harus

menyesuaikan situasi, kapasitas, dan respon dari masyarakat yang menjadi sasarannya. Tahapan kegiatan pemberdayaan menurut (Lippit, 1961 dalam Mardikanto, 2020) adalah sebagai berikut:

1. *Penyadaran* merupakan kegiatan yang dilaksanakan agar dapat menyadarkan masyarakat tentang "keberadaannya", baik itu sebagai individu maupun kondisi lingkungan yang menyangkut lingkungan fisik/teknis, sosial/budaya, ekonomi, dan politik.
2. *Menunjukkan adanya masalah* merupakan situasi yang tidak diharapkan yang berkaitan dengan: keadaan sumberdaya (alam, manusia, sarana-prasarana, kelembagaan, budaya, dan aksesibilitas), lingkungan fisik/teknis, sosial-budaya dan politis. Di dalamnya juga memuat faktor-faktor penyebab terjadinya masalah, terutama yang menyangkut kelemahan internal dan ancaman eksternalnya.
3. *Membantu pemecahan masalah* dapat dimulai sejak analisis akar-masalah, analisis alternatif pemecahan masalah, serta pilihan alternatif pemecahan terbaik yang dapat dilaksanakan sesuai dengan situasi internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan serta situasi eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman yang dihadapi.

4. *Menunjukkan pentingnya perubahan* yang sedang dan akan berlangsung di sekitarnya, baik dalam konteks organisasi maupun masyarakat (lokal, nasional, regional, dan global). Mengingat bahwa kondisi lingkungan (internal dan eksternal) terus berubah dengan cepat, masyarakat perlu dipersiapkan untuk menghadapi berbagai perubahan melalui ”perubahan yang terencana”.
5. *Melakukan pengujian dan demonstrasi* sebagai bagian dari pelaksanaan perubahan yang telah direncanakan dengan baik. Kegiatan uji coba dan demonstrasi ini sangat penting karena tidak semua inovasi selalu sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada.
6. *Memproduksi dan publikasi informasi* perlu disesuaikan dengan kemajuan teknologi, serta produk dan media publikasi yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik dari (calon) penerima manfaat dari penyuluhan tersebut.
7. *Melaksanakan pemberdayaan/penguatan kapasitas* dengan memberikan peluang kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung untuk menyampaikan pendapat dan memilih terkait akses informasi, keterlibatan dalam pemenuhan kebutuhan, serta partisipasi dalam seluruh proses pembangunan dan penguatan kapasitas lokal.

Sedangkan tahapan pemberdayaan masyarakat menurut (Tim Delivery, 2004 dalam Mardikanto, 2020) membagi pemberdayaan masyarakat menjadi empat tahapan, yaitu:

a. Seleksi Lokasi/Wilayah

Wilayah dipilih berdasarkan kriteria yang disetujui oleh lembaga, pihak terkait, dan masyarakat untuk memastikan pemilihan lokasi yang optimal dan mencapai tujuan pemberdayaan yang diinginkan.

b. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat

Sosialisasi merupakan cara untuk mengomunikasikan kegiatan dengan masyarakat dan pihak terkait guna membuka dialog. Melalui proses ini, diharapkan pemahaman tentang program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat ditingkatkan. Pentingnya sosialisasi karena dapat mempengaruhi minat dan keterlibatan masyarakat dalam program tersebut.

c. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat bertujuan meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup. Pada proses ini masyarakat bersama-sama melaksanakan langkah-langkah berikut:

- 1) Mengenali dan menganalisis potensi dan masalah wilayah beserta peluangnya
- 2) Merencanakan kegiatan kelompok
- 3) Melaksanakan rencana kegiatan kelompok
- 4) Terus memantau progres dan hasil kegiatan

d. Pemandirian Masyarakat

Prinsip pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memberdayakan masyarakat secara mandiri dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Fokusnya adalah membantu masyarakat agar dapat mengatur kegiatannya sendiri. Proses ini melibatkan pendampingan dari tim fasilitator dengan berbagai keahlian. Pada awalnya peran tim pendamping harus aktif, namun akan berkurang seiring berjalannya waktu hingga masyarakat mampu untuk mandiri.

1.6.4.4 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mathews (dalam Mardikanto, 2020) prinsip adalah sebuah panduan kebijakan yang konsisten dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Pada hakikatnya, prinsip menjadi dasar utama dalam menjalankan suatu aktivitas dengan baik dan benar. Pemberdayaan sendiri dilakukan agar mencapai kesejahteraan masyarakat dan membina agar masyarakat tersebut dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat perlu memahami berbagai prinsip dalam memberdayakan masyarakat. Menurut Mardikanto (2020) prinsip-prinsip pemberdayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengerjakan yaitu adanya partisipasi aktif dari masyarakat menjadi peran penting dalam program pemberdayaan karena mereka yang akan terlibat dalam penerapan berbagai program.
- 2) Akibat yaitu adanya manfaat atau dampak positif yang dapat diperoleh masyarakat dari adanya program pemberdayaan menjadi peran penting dalam program pemberdayaan karena akan memengaruhi motivasi dari masyarakat untuk terlibat dalam program pemberdayaan.
- 3) Asosiasi yaitu upaya dalam program pemberdayaan harus terintegrasi dengan program lainnya karena pada dasarnya masyarakat akan menghubungkan kegiatan yang mereka lakukan dengan kegiatan lainnya.

Prinsip pemberdayaan sendiri menekankan pada keterlibatan aktif dari peran masyarakat itu sendiri sehingga kedepannya dapat memiliki manfaat bagi kehidupan mereka. Pemberdayaan sendiri juga harus memiliki dampak yang positif bagi masyarakat agar mereka yakin dalam melakukan pemberdayaan akan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan bagi kehidupan mereka.

1.6.4.5 Tolok Ukur Keberhasilan Pemberdayaan

UNICEF (dalam Erowati, 2021) menjelaskan terdapat lima dimensi yang dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat, yaitu kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol. Lima dimensi tersebut bersifat dinamis dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain sehingga saling menyempurnakan. Lima dimensi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kesejahteraan. Pada dimensi ini dapat mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dari tercukupinya kebutuhan dasar, yaitu sandang, pangan, papan, pendapatan, pendidikan, dan kesehatan.
- b. Akses. Pada dimensi ini membahas tentang kesetaraan dalam mengakses sumber daya dan manfaat yang dapat diperoleh. Kesenjangan dapat terjadi pada dimensi ini karena tidak adanya kesetaraan akses terhadap sumber daya, yaitu waktu, tenaga, lahan, kredit, informasi, dan keterampilan.

- c. Kesadaran kritis. Pada dimensi ini masyarakat mulai sadar bahwa kesenjangan merupakan bentukan sosial yang bisa dan harus diubah karena sifatnya yang struktural sebagai akibat dari adanya diskriminasi.
- d. Partisipasi. Pada dimensi ini seluruh masyarakat terlibat dalam lembaga di dalamnya dengan masyarakat ikut andil dalam proses pengambilan keputusan sehingga kepentingan mereka dapat didengar.
- e. Kontrol. Pada dimensi ini seluruh lapisan masyarakat harus memegang kendali atas sumber daya yang tersedia. Dengan demikian sumber daya yang tersedia dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dalam memenuhi hak yang mereka miliki bukan hanya golongan orang yang berkuasa saja.

1.6.5 Konsep Kampung Tematik

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018, kampung tematik merupakan suatu area yang berada di bawah administrasi kelurahan, di dalamnya mengangkat dan menonjolkan potensi lokal melalui kesepakatan bersama sehingga dapat merefleksikan identitas atau kepribadian masyarakat sekitar. Berdasarkan regulasi tersebut, tujuan dari pelaksanaan kampung tematik dapat mencakup:

- a. Pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran;

- b. Transformasi lingkungan kumuh menjadi lebih baik dengan meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman;
- c. Peningkatan keterlibatan atau kontribusi masyarakat secara aktif dalam upaya mengatasi kemiskinan;
- d. Peningkatan potensi lokal yang terdapat di masyarakat dan lingkungan sekitar;
- e. Peningkatan kepedulian masyarakat dan membangun identitas kampung sebagai dorongan dalam pelaksanaan pembangunan daerah, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat;
- f. Memberikan dampak positif bagi kampung-kampung lain agar termotivasi dan terdorong untuk menciptakan kampung tematik yang serupa;
- g. Mendorong para pengusaha untuk menjalankan tanggung jawab sosial mereka dalam mendukung pelaksanaan kampung tematik di Kota Semarang;
- h. Mendorong pertumbuhan sirkulasi ekonomi di tingkat lokal atau wilayah;
- i. Memperbanyak destinasi wisata di Kota Semarang.

Dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018 juga menyebutkan hasil dari adanya pelaksanaan kampung tematik mencakup:

1. Terwujudnya karakter dan sikap masyarakat yang peduli terhadap lingkungan;
2. Tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui sirkulasi ekonomi yang berfokus pada potensi lokal yang dikembangkan;
3. Terwujudnya kualitas lingkungan permukiman yang lebih baik dan teratur, dengan terciptanya:
 - a. Jalan lingkungan yang berkualitas;
 - b. Saluran air yang berkualitas, dan
 - c. Sanitasi dan penghijauan yang berkualitas.

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Tematik Jawi dianalisis berdasarkan empat upaya pokok pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Keempat upaya pokok pemberdayaan masyarakat tersebut dapat diuraikan dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) **Bina Manusia.** Bina manusia menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pemberdayaan karena manusia menjadi pelaksana dari pemberdayaan itu sendiri sehingga bina manusia menjadi hal pokok dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam bina manusia juga terdapat

pengembangan kapasitas individu agar manusia yang terlibat dalam pemberdayaan dapat meningkatkan kualitas dirinya. Selain itu, dalam bina manusia juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan dilakukan pengembangan kapasitas unit, dan pengembangan kapasitas sistem (jejaring).

- 2) **Bina Usaha.** Bina usaha juga menjadi upaya penting dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Di dalam bina usaha terdapat proses pemilihan jenis usaha yang akan dijalankan, adanya pembentukan badan usaha yang akan dijalankan, bagaimana menetapkan sumber-sumber pembiayaan, bagaimana suatu entitas mengelola sumber daya manusia dan melakukan strategi dalam hal pengembangan karir yang berjalan.
- 3) **Bina Lingkungan.** Dalam dimensi ini, bina lingkungan terdiri dari lingkungan fisik yang berdampak dari adanya pemberdayaan masyarakat. Untuk lingkungan fisik sendiri, terdapat beberapa perlindungan dan pelestarian terkait sumber daya alam yang digunakan, seperti halnya peningkatan kesadaran lingkungan, pengelolaan sampah, dan perbaikan kualitas lingkungan.
- 4) **Bina Kelembagaan.** Dalam dimensi ini, terdiri dari beberapa komponen yang melekat dengan adanya pemberdayaan masyarakat. Bina kelembagaan sendiri nantinya akan berperan penting dalam

keberlangsungan pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat dikelompokkan menjadi beberapa unsur kelembagaan, yaitu:

- a. Komponen person yang nantinya masyarakat di dalamnya harus dapat diidentifikasi dengan jelas keberadaannya;
- b. Komponen kepentingan yang nantinya masyarakat di dalamnya mengalami interaksi satu sama lain dan berada dalam suatu kepentingan yang sama yaitu pemberdayaan masyarakat;
- c. Komponen aturan yang nantinya di dalam pemberdayaan masyarakat pasti terdapat regulasi yang berlaku untuk masyarakat di dalamnya sehingga segala sesuatu yang dilakukan harus berlandaskan aturan.
- d. Komponen struktur yang nantinya masyarakat yang diberdayakan akan mendapatkan perannya masing-masing sehingga tidak adanya tumpang tindih antara satu sama lain dan diharapkan dengan adanya komponen struktur ini masyarakat dapat menjalankan tanggungjawabnya masing-masing.

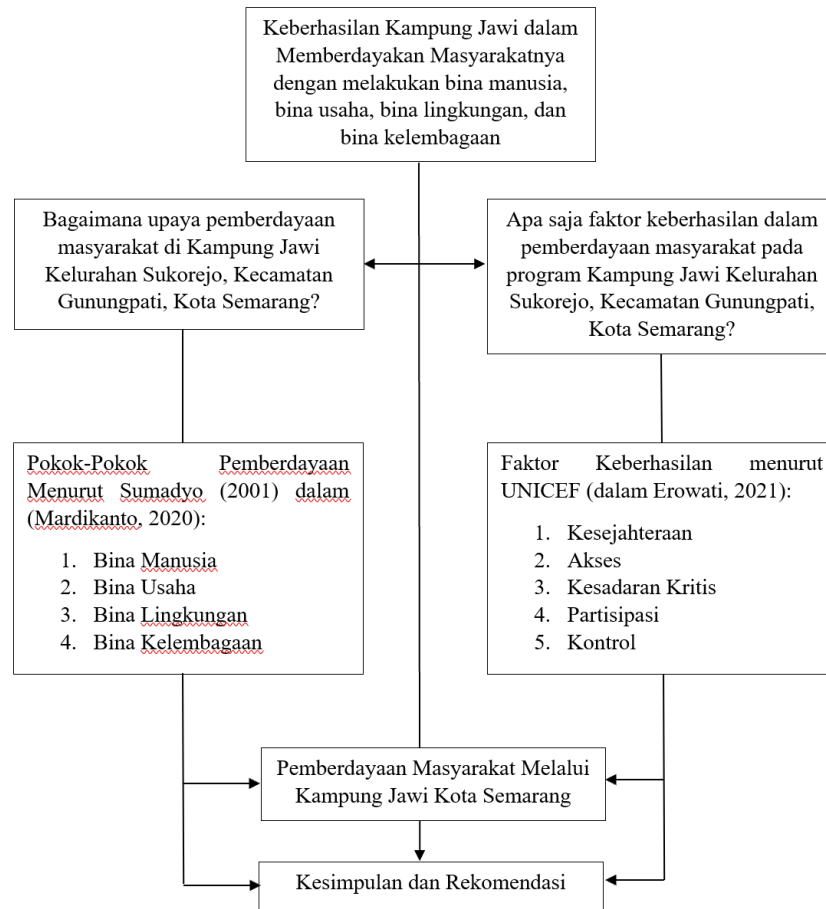
1.7.2 Tolok Ukur Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Tematik Jawi

Faktor keberhasilan yang akan dianalisis pada program pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Tematik Jawi di antaranya, yaitu:

- 1) Kesejahteraan. Dalam pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Tematik Jawi di Kota Semarang terutama di Kelurahan Sukorejo dapat dianalisis keberhasilannya dengan melihat seberapa jauh peningkatan pendapatan masyarakat di Kampung Tematik Jawi, bagaimana pengembangan infrastruktur yang sudah berjalan di Kampung Tematik Jawi, bagaimana bentuk perbaikan kualitas hidup masyarakat di Kampung Tematik Jawi, dan bagaimana proses penurunan tingkat kemiskinan di Kampung Tematik Jawi.
- 2) Akses. Dalam pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Tematik Jawi di Kota Semarang terutama di Kelurahan Sukorejo dapat dilihat seberapa dalam masyarakat dapat mengakses sumber daya, yaitu bagaimana masyarakat Kampung Tematik Jawi dalam mengakses sumber daya ekonomi, bagaimana masyarakat Kampung Tematik Jawi dalam mengakses informasi dan teknologi, dan bagaimana masyarakat Kampung Tematik Jawi mengakses layanan kesehatan di sekitar mereka.
- 3) Kesadaran kritis. Dalam pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Tematik Jawi di Kota Semarang terutama di Kelurahan Sukorejo dapat dinilai seberapa sadar masyarakat di dalamnya terkait potensi yang mereka miliki dengan berbagai masalah sosial yang harus mereka hadapi, serta bentukan sosial yang dapat dan harus mereka ubah.

- 4) Partisipasi. Dalam pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Tematik Jawi di Kota Semarang terutama di Kelurahan Sukorejo dapat diamati seberapa banyak tingkat partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan, mulai dari proses perencanaan program, pengambilan keputusan hingga pelaksanaan program.
- 5) Kontrol. Dalam pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Tematik Jawi di Kota Semarang terutama di Kelurahan Sukorejo dapat dilihat dan dinilai tentang bagaimana masyarakat Kampung Tematik Jawi mengendalikan aset ekonomi yang mereka miliki dan bagaimana mereka mengendalikan sumber daya yang ada di lingkungan Kampung Tematik Jawi.

1.8 Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1. 5 Kerangka Pikir Penelitian

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Anselm Strauss dan Juliet Corbin (2009) (dalam Kismartini, 2023) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan. Penelitian kualitatif dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat, dan perilaku seseorang, dapat juga membahas tentang peran organisasi, pergerakan sosial, atau hubungan timbal balik.

1.9.2 Lokus dan Fokus Penelitian

Lokus penelitian merupakan lokasi di mana masalah penelitian terjadi dan peneliti mendapatkan informasi dari objek yang diteliti (Kismartini, 2023). Peneliti memilih lokasi penelitian di Kampung Tematik Jawi yang beralamat di Jalan Kalialang Lama, RT 02 RW 01, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. (Sugiyono, 2014) mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Fokus penelitian yang ditetapkan oleh peneliti adalah pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Tematik Jawi.

Tabel 1. 2 Fenomena Penelitian

Fokus	Fenomena	Gejala
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Tematik Jawi	Bina Manusia	Pengembangan Kapasitas Individu
		Pengembangan Kapasitas Unit
		Pengembangan Kapasitas Sistem (Jejaring)
	Bina Usaha	Pemilihan Komoditas & Jenis Usaha
		Pembentukan Badan Usaha
		Penetapan Sumber-Sumber Pembiayaan
		Pengelolaan Sumber Daya Manusia & Pengembangan Karir
	Bina Lingkungan	Tanggungjawab terhadap Lingkungan (Peduli Lingkungan & Pengelolaan Sampah)
	Bina Kelembagaan	Komponen Person
		Komponen Kepentingan
		Komponen Aturan
		Komponen Struktur
Faktor Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Tematik Jawi Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang	Kesejahteraan	Peningkatan Pendapatan
		Pengembangan Infrastruktur
		Perbaikan Kualitas Hidup
		Penurunan Tingkat Kemiskinan
	Akses	Akses Sumber Daya Ekonomi
		Akses Informasi & Teknologi

Fokus	Fenomena	Gejala
	Kesadaran Kritis	Akses Layanan Kesehatan
		Bentukan Sosial yang Dapat dan Harus Diubah
	Partisipasi	Kesadaran Potensi yang Dimiliki
		Keterlibatan Dalam Perencanaan Program
		Keterlibatan Dalam Pengambilan Keputusan
		Keterlibatan Dalam Implementasi Program
	Kontrol	Pengendalian Aset Ekonomi
		Pengendalian Sumber Daya

1.9.3 Subjek Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun pihak lain yang memahami objek penelitian (Kismartini, 2023). Penelitian ini nantinya akan mendapatkan informan penelitian dengan cara *key person*, yaitu peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian sehingga peneliti dapat menemui *key person* untuk memulai wawancara atau observasi. Dalam penelitian terdapat beberapa informan yaitu Kepala Sub Koordinator Perencanaan Sosial pada Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah Kota Semarang, Analis Informasi Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Kepala Kelurahan

Sukorejo, Ketua RT 01 Kelurahan Sukorejo, Ketua Pokdarwis Kampung Tematik Jawi, Wakil Ketua Pokdarwis Kampung Tematik Jawi, dan Koordinator Ibu-Ibu.

1.9.4 Jenis dan Sumber Data

Peneliti menggunakan jenis data dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Dalam laporan penelitian akan memuat beberapa kutipan langsung agar deskripsi yang diberikan sesuai dengan kondisi lapangan. Data yang tersedia dalam penelitian ini adalah transkrip wawancara dan dokumentasi foto. Apabila dilihat dari sumber data, (Sugiyono, 2014) menjelaskan pengumpulan data dapat menggunakan dua sumber data, yaitu:

- a. Sumber primer, merupakan sumber yang langsung memberikan suatu data kepada pengumpul data, artinya data tersebut diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini sumber data primer dapat diperoleh dari penelitian dan pada saat wawancara kepada beberapa informan di bawah ini:
- b. Sumber sekunder, merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, artinya data tersebut diperoleh secara tidak langsung. Dalam penelitian ini sumber data sekunder dapat diperoleh dari dokumen berupa *e-book* yang relevan dengan topik penelitian.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data sehingga teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Tanpa memahami teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan memperoleh data yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2018). Apabila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, (Sugiyono, 2018) membaginya menjadi empat, yaitu:

1. Observasi

Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan secara tidak terstruktur karena fokus penelitian masih belum definitif dan kedepannya akan berkembang seiring dengan berlangsungnya kegiatan observasi (Sugiyono, 2018). Fokus observasi dalam penelitian ini adalah bagaimana Kampung Tematik Jawi memberdayakan masyarakatnya.

2. Wawancara

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2014) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Menurut Susan Stainback (dalam Sugiyono, 2014) dengan adanya wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi.

Sistematika wawancara semiterstruktur dalam pelaksanaannya lebih fleksibel dibandingkan dengan wawancara terstruktur, dengan tujuan untuk mengidentifikasi permasalahan secara lebih terbuka, di mana responden akan diminta untuk memberikan pendapat dan ide-ide mereka (Sugiyono, 2018). Wawancara semiterstruktur akan digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Tematik Jawi di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati serta faktor-faktor keberhasilan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kampung tematik tersebut. Berbagai informasi dan data akan diperoleh melalui interaksi secara langsung sehingga peneliti harus mendengarkan secara teliti dan mencatat informasi yang diberikan oleh informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat berbentuk tulisan dan gambar misalnya sejarah kehidupan (*life histories*), peraturan, dan kebijakan. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2014). Hasil penelitian akan lebih kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Dalam penelitian menggunakan teknik ini, peneliti akan menggali informasi dari dokumen, merekam audio, dan mengambil foto berdasarkan materi yang relevan.

4. Triangulasi

Triangulasi adalah metode pengumpulan data yang mengintegrasikan berbagai teknik dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2018). Tujuan dari penerapan teknik triangulasi adalah untuk memperdalam pemahaman peneliti mengenai temuan yang telah diperoleh (Sugiyono, 2018).

1.9.6 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan baik selama proses pengumpulan data maupun setelah selesai dalam jangka waktu tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengajukan pertanyaan tambahan jika jawaban dari wawancara belum memuaskan sampai data yang diperoleh dianggap kredibel (Sugiyono, 2018). Pengolahan data kualitatif pada penelitian ini melalui beberapa langkah menurut Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2018) sebagai berikut:

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih, dan menyoroti hal-hal yang penting, serta mencari tema dan pola yang ada. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data berikutnya serta mencarinya jika diperlukan (Sugiyono, 2018). Dalam tahap ini, para informan akan dikurangi

apabila informasi yang diberikan tidak relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

b. Data Display (Penyajian Data)

Penelitian ini akan menampilkan data-data dalam bentuk tabel disertai dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menampilkan beberapa data harapannya akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan langkah selanjutnya sesuai dengan data yang telah tersedia.

c. Conclusion (Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat tentatif sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga tidak karena permasalahan dalam penelitian kualitatif akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan (Sugiyono, 2014).

1.9.7 Kualitas Data atau Validitas Data

Dalam penelitian kualitatif, data dianggap valid jika terdapat perbedaan antara apa yang dilaporkan oleh peneliti dan kenyataan yang terjadi pada obyek yang diteliti. Kebenaran data dalam penelitian kualitatif bersifat beragam (Sugiyono, 2018). Peneliti akan menguji data yang diperoleh dengan menggunakan uji kredibilitas berupa triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, diantaranya:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber bertujuan untuk menguji kredibilitas data dengan cara memverifikasi informasi yang didapat melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2018).

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik bertujuan untuk menguji kredibilitas data dengan memverifikasi informasi dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2018). Misalnya, data yang telah diperoleh dari hasil wawancara akan dibandingkan dengan hasil observasi atau dokumentasi.